



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. ( 0387 ) 61213**  
**WAINGAPU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**NOMOR : PPO.421.1/949/II/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN**

**ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [ PAUDNI ]**

**KEPADA PAUD " CERIA "**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 17 Januari 2016 dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada PAUD " CERIA ".
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diberi Surat Keputusan tentang penyelenggaraan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal
4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Rencana Strategis (Renstra ) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

Memperhatikan :

Surat permohonan izin Operasional penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **CERIA** " Nomor: 02/P-CERIA /I/2016 tanggal 10 Januari 2016, perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.

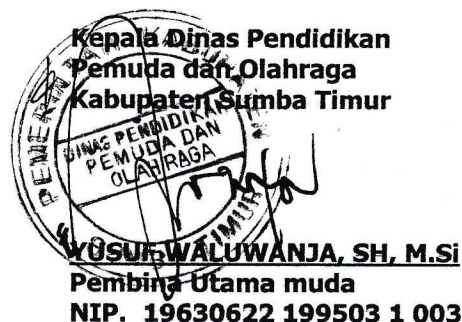
### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal ( PAUDNI ) Kepada :
- Nama Lembaga/KOBER : " **CERIA** "
- Tahun berdiri : 1 Februari 2015
- Alamat : Block C Tanaraing
- Desa/Kelurahan : Tanaraing
- Kecamatan : Rindi
- Kabupaten : Sumba Timur
- Pembina : 1. Camat Rindi  
2. Bunda PAUD Kec. Rindi  
3. Kepala Desa Tanaraing  
4. Bunda PAUD Desa Tanaraing
- Penanggungjawab : Oktavianus Nduka, S.Sos
- Pengelola : Adriana Hamaduna
- Sekretaris : Yunita Padji Jera
- Bendahara : Uru Eli
- Pendidik : 1. Diana Kristiani K. M.  
2. Marlince Dembi Tamar  
3. Uru Eli
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **17 Februari 2016** sampai dengan **17 Februari 2020**.
- Ketiga : Penyelenggara/pengelola :
- a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
- c. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Waingapu  
Pada Tanggal : 17 Februari 2016



Tembusan disampaikan dengan hormat,  
Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu